DAFTAR DOKUMEN RISALAH RAPAT

No	Tanggal Rapat	Jenis Rapat	Pokok Bahasan	Unit Kerja peserta	Keterangan
1	10 Januari 2024	Rapat Internal	Penyusunan DIM Awal	Biro Ortala dan Biro Hukum	Pembasahan Awal
2	13 September 2024	Rapat Pembahasan Rancangan Permendagri	Beberapa catatan atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri antara lain: a. Untuk dipertimbangkan penulisan pertimbangan yuridis; b. Menghapus dari konsideran mengingat terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Perbaikan pengertian Unit Layanan Administrasi yang selanjutnya disingkat ULA adalah ruang layanan yang memfasilitasi layanan administrasi layanan konsultasi yang penyelenggaraannya melibatkan seluruh unit kerja dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;	Biro Ortala dan Biro Hukum	Koreksi teknis dan substansi

2	30 Oktober 2024	Rapat Pembahasan Rancangan Permendagri	<p>Beberapa catatan atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghapusan Bab Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; b. Perbaikan penulisan rumusan Pasal 3 ayat (2) semula "Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan pada dst" menjadi "Pengoordinasian Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) dilaksanakan terhadap dst"; 	Biro Ortala dan Biro Hukum	
3	21 November 2025	Rapat Pembahasan Rancangan Permendagri	<p>Laporan Rapat Koordinasi Fasilitasi Layanan Administrasi dan Konsultasi untuk Membahas Penyusunan Rancangan Permendagri tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri:</p> <p>Terdapat beberapa revisi yang diberikan oleh Kemenkum dalam penyusunan permendagri ini, diantaranya adalah:</p>	Biro Ortala dan Biro Hukum	Koreksi teknis dan substansi

		<ul style="list-style-type: none">▪ Pada Diktum Menimbang diharapkan ditambahkan frasa pertimbangan yuridis yang menjadi dasar dan latar belakang dibuat peraturan tersebut;▪ Pada Diktum Mengingat diharapkan menghapus beberapa peraturan yang sudah tidak relevan lagi diantaranya poin 3 dan 5;▪ BAB II terkait kedudukan, tugas, dan fungsi dihilangkan dan dijadikan Pasal 2 dengan ditambahkan : Pengkoordinasian oleh Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: 1) satuan unit kerja eselon I; dan 2) unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian. <p>Perubahan paragraf 3 yang tadinya Pembinaan dan Pengawasan menjadi Pelaporan dan Evaluasi;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pengubahan penulisan Eselon I menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;▪ Pengubahan paragraf 4 terkait Penyuluhan kepada Pengguna Layanan menjadi Sosialisasi Layanan Administrasi dan Konsultasi;▪ Penambahan poin pada pasal 23 tentang Survey Kepuasan Masyarakat yaitu: 1) Survei internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap saat setelah pengguna layanan mendapatkan Layanan Administrasi dan Layanan		
--	--	--	--	--

			<p>Konsultasi. 2) Survei eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh ahli secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisi pada Bagian Kedelapan penggantian judul Pelaksana menjadi Peningkatan Kapasitas Pelaksana Pelayanan Publik 		
4	25 November 2025	Rapat Pembahasan Rancangan Permendagri	<p>Penyusunan draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Layanan Administrasi dan Konsultasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri akan dilakukan pengkajian dan revisi sesuai dengan arahan Staf Khusus; dan Akan dilakukan koordinasi dan pembahasan revisi kembali untuk kemudian diparaf setelah revisi dilakukan untuk selanjutnya pengesahan Permendagri tentang ULA.</p>	Biro Ortala dan Biro Hukum	Menyepakati versi final rancangan